

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sukoharjo

Halaman 12

Anggaran Jasa Nakes Ditambah Rp9,5 Miliar

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO—Anggaran belanja jasa tenaga kesehatan (nakes) ditambah Rp9,5 miliar dari Rp7,7 miliar sehingga menjadi Rp17,3 miliar. Sebagian besar anggaran belanja jasa nakes tersedot untuk membayar insentif.

Selain insentif nakes, anggaran belanja jasa tenaga kesehatan digunakan untuk santuan kematian bagi tenaga kesehatan baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN serta sukarelawan pendukung penanganan pandemi Covid-19. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No HK.0107/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan pemerintah telah membayar intensif tenaga kesehatan semester I 2021 senilai Rp11,7 miliar. Hal itu menurutnya sebagai wujud penghargaan atau *reward* atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melawan persebaran Covid-19. Para nakes dianggap berisiko tinggi terinfeksi Covid-19 karena saban hari merawat pasien positif di rumah sakit.

“Sebagian anggaran penanganan Covid-19

digunakan untuk membayar intensif tenaga kesehatan. Mereka bekerja ekstra keras selama 24 jam untuk menahan gempuran virus,” kata dia, saat ditemui *Espos* di kantornya, Senin (4/10/2021).

Richard menyampaikan intensif nakes pada semester II 2021 dibayarkan pada awal 2022. Alokasi anggaran belanja jasa tenaga kesehatan dinilai memadai sehingga tak perlu menggeser plot anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo.

Penggunaan anggaran pembayaran insentif tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17/PMK.07/2021. “Penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dilakukan secara hati-hati dan harus berpedoman pada regulasi,” ujar dia.

Dalam APBD-Perubahan 2021, Pemkab Sukoharjo juga mengalokasikan belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN senilai Rp20 miliar. Menurut Richard, penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan membutuhkan biaya operasional tinggi. Terlebih, saat ini, pemerintah menggenjot capaian vaksinasi agar bisa turun level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri, mengatakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus tertib administrasi keuangan dan perencanaan. Agus menyatakan sudah selayaknya para nakes menerima penghargaan berupa insentif setiap bulan.